



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022; dan
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126); dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 451 (*empat ratus lima puluh satu*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- KEDUA : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 103 (*seratus tiga*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- KETIGA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Menghimbau kepada pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2022

HASIL PEMANTAUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

Hasil Pemantauan SPBE Kementerian

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	2,92	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2,60	Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2,93	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2,68	Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2,90	Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3,84	Sangat Baik
7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,01	Baik
8	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,32	Baik
9	Kementerian Dalam Negeri	3,63	Sangat Baik
10	Kementerian Pertahanan	2,62	Baik
11	Kementerian Pertanian	3,75	Sangat Baik
12	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,51	Sangat Baik
13	Kementerian Perhubungan	3,33	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
14	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3,86	Sangat Baik
15	Kementerian Kesehatan	2,94	Baik
16	Kementerian Agama	2,26	Cukup
17	Kementerian Ketenagakerjaan	2,84	Baik
18	Kementerian Sosial	2,28	Cukup
19	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2,73	Baik
20	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,30	Baik
21	Kementerian Perindustrian	2,87	Baik
22	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	3,17	Baik
23	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,42	Baik
24	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	3,62	Sangat Baik
25	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	3,55	Sangat Baik

Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Siber dan Sandi Negara	2,87	Baik
2	Lembaga Administrasi Negara	3,57	Sangat Baik
3	Arsip Nasional Republik Indonesia	2,74	Baik
4	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2,96	Baik
5	Perpustakaan Nasional RI	3,51	Sangat Baik
6	Badan Pengawas Obat dan Makanan	3,12	Baik
7	Lembaga Ketahanan Nasional RI	2,57	Cukup
8	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2,69	Baik
9	Badan Narkotika Nasional	2,17	Cukup
10	Badan Keamanan Laut	2,71	Baik
11	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	2,85	Baik
12	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3,21	Baik
13	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2,00	Cukup
14	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	3,05	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Alat Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Intelijen Negara	3,13	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Kabinet

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Kabinet	2,30	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kejaksaan Agung	2,18	Cukup
2	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2,77	Baik
3	Dewan Perwakilan Rakyat	2,95	Baik
4	Mahkamah Agung RI	2,61	Baik
5	Badan Pemeriksa Keuangan	2,68	Baik
6	Mahkamah Konstitusi	1,80	Cukup
7	Komisi Yudisial	1,82	Cukup
8	Dewan Perwakilan Daerah	2,18	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Instansi Lainnya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2,32	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Televisi Republik Indonesia	2,09	Cukup
2	Radio Republik Indonesia	2,01	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Dewan Ketahanan Nasional	2,63	Baik
2	Komisi Pemilihan Umum	2,73	Baik
3	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2,85	Baik
4	Ombudsman Republik Indonesia	3,01	Baik
5	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1,39	Kurang
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1,88	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Komisi Penyiaran Indonesia	2,34	Cukup
8	Komisi Kejaksaan	1,08	Kurang
9	Komisi Aparatur Sipil Negara	3,31	Baik
10	Dewan Pers	1,42	Kurang
11	Dewan Jaminan Sosial Nasional	2,71	Baik
12	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	1,71	Kurang
13	Lembaga Sensor Film	2,14	Cukup
14	Konsil Kedokteran Indonesia	2,03	Cukup
15	Kantor Staf Presiden	2,44	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	2,76	Baik
2	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,29	Cukup
3	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,63	Baik
4	Pemerintah Kab. Bireuen	2,10	Cukup
5	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,20	Cukup
7	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,60	Baik
8	Pemerintah Kota Sabang	1,59	Kurang
9	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,15	Baik
10	Pemerintah Kota Langsa	1,82	Cukup
11	Pemerintah Kota Subulussalam	1,76	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	2,81	Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,32	Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	2,42	Cukup
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,02	Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	1,62	Kurang
6	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	1,85	Cukup
7	Pemerintah Kab. Dairi	2,05	Cukup
8	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,39	Cukup
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	2,68	Baik
10	Pemerintah Kab. Asahan	1,49	Kurang
11	Pemerintah Kab. Toba	1,86	Cukup
12	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,58	Cukup
13	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	1,84	Cukup
14	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,40	Cukup
15	Pemerintah Kab. Samosir	2,62	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	1,92	Cukup
17	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	1,91	Cukup
18	Pemerintah Kab. Batubara	2,18	Cukup
19	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	2,04	Cukup
20	Pemerintah Kota Binjai	1,82	Cukup
21	Pemerintah Kota Pematang Siantar	2,35	Cukup
22	Pemerintah Kota Tanjung Balai	2,30	Cukup
23	Pemerintah Kota Sibolga	1,73	Kurang
24	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	1,95	Cukup
25	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,01	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Riau	3,00	Baik
2	Pemerintah Kab. Kampar	2,22	Cukup
3	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,24	Cukup
4	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	2,38	Cukup
5	Pemerintah Kab. Siak	2,34	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2,12	Cukup
7	Pemerintah Kota Pekanbaru	2,83	Baik
8	Pemerintah Kota Dumai	2,63	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2,68	Baik
2	Pemerintah Kab. Bintan	2,10	Cukup
3	Pemerintah Kab. Natuna	2,50	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1,85	Cukup
5	Pemerintah Kota Batam	2,85	Baik
6	Pemerintah Kota Tanjungpinang	1,85	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,18	Baik
2	Pemerintah Kab. Agam	2,38	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pasaman	1,91	Cukup
4	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	3,29	Baik
5	Pemerintah Kab. Solok	3,12	Baik
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,60	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	3,48	Baik
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	3,21	Baik
9	Pemerintah Kab. Sijunjung	2,18	Cukup
10	Pemerintah Kab. Solok Selatan	2,26	Cukup
11	Pemerintah Kab. Dharmasraya	2,41	Cukup
12	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2,36	Cukup
13	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,46	Cukup
14	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,81	Baik
15	Pemerintah Kota Sawahlunto	2,84	Baik
16	Pemerintah Kota Solok	2,71	Baik
17	Pemerintah Kota Padang	3,01	Baik
18	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,02	Baik
19	Pemerintah Kota Pariaman	2,64	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jambi	2,19	Cukup
2	Pemerintah Kab. Batang Hari	3,04	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	1,63	Kurang
4	Pemerintah Kab. Bungo	1,50	Kurang
5	Pemerintah Kab. Merangin	1,56	Kurang
6	Pemerintah Kab. Kerinci	1,52	Kurang
7	Pemerintah Kab. Sarolangun	2,63	Baik
8	Pemerintah Kab. Tebo	2,11	Cukup
9	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	1,92	Cukup
10	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	2,16	Cukup
11	Pemerintah Kota Jambi	2,79	Baik
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh	1,97	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	2,80	Baik
2	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,67	Baik
3	Pemerintah Kab. Muara Enim	2,91	Baik
4	Pemerintah Kab. Lahat	2,14	Cukup
5	Pemerintah Kab. Musi Rawas	1,92	Cukup
6	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	2,39	Cukup
7	Pemerintah Kab. Banyuasin	1,86	Cukup
8	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	1,93	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	2,52	Cukup
10	Pemerintah Kab. Empat Lawang	1,86	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	1,53	Kurang
12	Pemerintah Kota Pagar Alam	2,01	Cukup
13	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2,45	Cukup
14	Pemerintah Kota Prabumulih	2,62	Baik
15	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1,83	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3,01	Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	1,85	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,02	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	2,30	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	2,80	Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,01	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	2,70	Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	2,22	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	3,11	Baik
2	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	2,17	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2,31	Cukup
4	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	2,80	Baik
5	Pemerintah Kab. Seluma	2,54	Cukup
6	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,04	Cukup
7	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,13	Cukup
8	Pemerintah Kab. Lebong	1,55	Kurang
9	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,34	Cukup
10	Pemerintah Kota Bengkulu	2,19	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	3,37	Baik
2	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2,10	Cukup
3	Pemerintah Kab. Lampung Utara	2,43	Cukup
4	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2,26	Cukup
5	Pemerintah Kab. Tanggamus	1,60	Kurang
6	Pemerintah Kab. Way Kanan	2,24	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Pringsewu	2,00	Cukup
9	Pemerintah Kab. Mesuji	2,59	Cukup
10	Pemerintah Kota Metro	2,49	Cukup
11	Pemerintah Kota Bandar Lampung	1,50	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3,67	Sangat Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3,37	Baik
2	Pemerintah Kab. Bogor	3,33	Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	2,29	Cukup
4	Pemerintah Kab. Cianjur	2,37	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bekasi	1,71	Kurang
6	Pemerintah Kab. Karawang	3,08	Baik
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	2,28	Cukup
8	Pemerintah Kab. Subang	2,35	Cukup
9	Pemerintah Kab. Bandung	2,82	Baik
10	Pemerintah Kab. Sumedang	3,84	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	2,58	Cukup
12	Pemerintah Kab. Ciamis	2,64	Baik
13	Pemerintah Kab. Cirebon	2,66	Baik
14	Pemerintah Kab. Kuningan	2,88	Baik
15	Pemerintah Kab. Indramayu	3,09	Baik
16	Pemerintah Kab. Bandung Barat	2,65	Baik
17	Pemerintah Kab. Pangandaran	2,82	Baik
18	Pemerintah Kota Bandung	3,61	Sangat Baik
19	Pemerintah Kota Bogor	2,75	Baik
20	Pemerintah Kota Cirebon	3,17	Baik
21	Pemerintah Kota Bekasi	2,78	Baik
22	Pemerintah Kota Depok	3,42	Baik
23	Pemerintah Kota Cimahi	3,09	Baik
24	Pemerintah Kota Tasikmalaya	2,62	Baik
25	Pemerintah Kota Banjar	2,38	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,03	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	2,64	Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	2,47	Cukup
4	Pemerintah Kab. Lebak	2,63	Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	2,66	Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	2,60	Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,01	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,49	Cukup
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	2,54	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	3,02	Baik
2	Pemerintah Kab. Sleman	3,19	Baik
3	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,62	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	3,34	Baik
2	Pemerintah Kab. Semarang	2,13	Cukup
3	Pemerintah Kab. Kendal	2,93	Baik
4	Pemerintah Kab. Grobogan	3,37	Baik
5	Pemerintah Kab. Pekalongan	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Batang	2,85	Baik
7	Pemerintah Kab. Tegal	3,07	Baik
8	Pemerintah Kab. Brebes	2,40	Cukup
9	Pemerintah Kab. Kudus	3,38	Baik
10	Pemerintah Kab. Pemalang	2,23	Cukup
11	Pemerintah Kab. Jepara	3,14	Baik
12	Pemerintah Kab. Rembang	3,19	Baik
13	Pemerintah Kab. Blora	2,36	Cukup
14	Pemerintah Kab. Banyumas	2,60	Baik
15	Pemerintah Kab. Cilacap	2,87	Baik
16	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,20	Baik
17	Pemerintah Kab. Banjarnegara	2,86	Baik
18	Pemerintah Kab. Magelang	3,13	Baik
19	Pemerintah Kab. Wonosobo	2,90	Baik
20	Pemerintah Kab. Purworejo	2,80	Baik
21	Pemerintah Kab. Kebumen	3,44	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
22	Pemerintah Kab. Sragen	3,10	Baik
23	Pemerintah Kab. Sukoharjo	3,42	Baik
24	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,32	Baik
25	Pemerintah Kab. Wonogiri	3,34	Baik
26	Pemerintah Kota Semarang	3,38	Baik
27	Pemerintah Kota Salatiga	2,84	Baik
28	Pemerintah Kota Tegal	3,05	Baik
29	Pemerintah Kota Magelang	2,67	Baik
30	Pemerintah Kota Surakarta	3,73	Sangat Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3,30	Baik
2	Pemerintah Kab. Gresik	3,27	Baik
3	Pemerintah Kab. Mojokerto	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo	2,29	Cukup
5	Pemerintah Kab. Jombang	2,96	Baik
6	Pemerintah Kab. Sampang	2,55	Cukup
7	Pemerintah Kab. Pamekasan	2,10	Cukup
8	Pemerintah Kab. Sumenep	2,05	Cukup
9	Pemerintah Kab. Bangkalan	1,89	Cukup
10	Pemerintah Kab. Bondowoso	2,23	Cukup
11	Pemerintah Kab. Situbondo	3,19	Baik
12	Pemerintah Kab. Jember	1,99	Cukup
13	Pemerintah Kab. Malang	2,22	Cukup
14	Pemerintah Kab. Pasuruan	2,04	Cukup
15	Pemerintah Kab. Probolinggo	2,42	Cukup
16	Pemerintah Kab. Lumajang	2,60	Baik
17	Pemerintah Kab. Kediri	2,61	Baik
18	Pemerintah Kab. Tulungagung	2,38	Cukup
19	Pemerintah Kab. Nganjuk	2,18	Cukup
20	Pemerintah Kab. Trenggalek	2,55	Cukup
21	Pemerintah Kab. Blitar	2,61	Baik
22	Pemerintah Kab. Magetan	2,27	Cukup
23	Pemerintah Kab. Ponorogo	2,32	Cukup
24	Pemerintah Kab. Pacitan	2,31	Cukup
25	Pemerintah Kab. Bojonegoro	2,65	Baik
26	Pemerintah Kab. Tuban	2,32	Cukup
27	Pemerintah Kab. Lamongan	2,82	Baik
28	Pemerintah Kota Surabaya	3,69	Sangat Baik
29	Pemerintah Kota Mojokerto	3,32	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
30	Pemerintah Kota Malang	2,60	Baik
31	Pemerintah Kota Pasuruan	2,66	Baik
32	Pemerintah Kota Probolinggo	1,97	Cukup
33	Pemerintah Kota Blitar	2,81	Baik
34	Pemerintah Kota Kediri	2,96	Baik
35	Pemerintah Kota Madiun	2,86	Baik
36	Pemerintah Kota Batu	2,41	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,42	Baik
2	Pemerintah Kab. Sambas	2,44	Cukup
3	Pemerintah Kab. Sanggau	2,88	Baik
4	Pemerintah Kab. Sintang	1,03	Kurang
5	Pemerintah Kab. Mempawah	2,61	Baik
6	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2,76	Baik
7	Pemerintah Kab. Ketapang	1,91	Cukup
8	Pemerintah Kab. Bengkayang	1,87	Cukup
9	Pemerintah Kab. Landak	2,13	Cukup
10	Pemerintah Kab. Sekadau	2,46	Cukup
11	Pemerintah Kab. Kubu Raya	2,34	Cukup
12	Pemerintah Kab. Kayong Utara	1,88	Cukup
13	Pemerintah Kota Pontianak	3,28	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1,90	Cukup
2	Pemerintah Kab. Barito Utara	1,42	Kurang
3	Pemerintah Kab. Barito Selatan	2,37	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	2,38	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2,15	Cukup
6	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	1,64	Kurang
7	Pemerintah Kab. Lamandau	2,15	Cukup
8	Pemerintah Kab. Sukamara	1,84	Cukup
9	Pemerintah Kab. Katingan	2,25	Cukup
10	Pemerintah Kab. Barito Timur	1,71	Kurang
11	Pemerintah Kota Palangka Raya	2,66	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Banjar	2,56	Cukup
2	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,11	Baik
3	Pemerintah Kab. Tapin	2,29	Cukup
4	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,69	Baik
5	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,59	Cukup
6	Pemerintah Kab. Tabalong	2,00	Cukup
7	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,04	Cukup
8	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Balangan	2,44	Cukup
10	Pemerintah Kota Banjarmasin	3,31	Baik
11	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,26	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,11	Cukup
2	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	1,94	Cukup
3	Pemerintah Kab. Paser	2,13	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kutai Barat	1,81	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kutai Timur	2,79	Baik
6	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	1,82	Cukup
7	Pemerintah Kota Samarinda	2,44	Cukup
8	Pemerintah Kota Balikpapan	3,05	Baik
9	Pemerintah Kota Bontang	2,70	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	1,98	Cukup
2	Pemerintah Kab. Bulungan	2,32	Cukup
3	Pemerintah Kota Tarakan	2,11	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Minahasa	1,80	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2,74	Baik
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	1,68	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2,09	Cukup
6	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	1,51	Kurang

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,04	Cukup
8	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	2,22	Cukup
9	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,15	Cukup
10	Pemerintah Kota Manado	1,82	Cukup
11	Pemerintah Kota Bitung	2,57	Cukup
12	Pemerintah Kota Tomohon	1,76	Kurang
13	Pemerintah Kota Kota Mobagu	2,25	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	2,48	Cukup
2	Pemerintah Kab. Gorontalo	2,03	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bone Bolango	2,30	Cukup
4	Pemerintah Kota Gorontalo	2,59	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2,26	Cukup
2	Pemerintah Kab. Poso	1,81	Cukup
3	Pemerintah Kab. Buol	2,08	Cukup
4	Pemerintah Kab. Morowali	1,97	Cukup
5	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	2,04	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sigi	1,91	Cukup
7	Pemerintah Kota Palu	1,76	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2,35	Cukup
2	Pemerintah Kab. Wajo	2,51	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bone	2,11	Cukup
4	Pemerintah Kab. Maros	2,04	Cukup
5	Pemerintah Kab. Luwu	2,26	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sinjai	2,07	Cukup
7	Pemerintah Kab. Bulukumba	1,81	Cukup
8	Pemerintah Kab. Bantaeng	2,29	Cukup
9	Pemerintah Kab. Jeneponto	2,16	Cukup
10	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	1,83	Cukup
11	Pemerintah Kab. Barru	2,06	Cukup
12	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	2,32	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
13	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,12	Cukup
14	Pemerintah Kab. Soppeng	2,67	Baik
15	Pemerintah Kab. Enrekang	2,65	Baik
16	Pemerintah Kab. Luwu Utara	2,93	Baik
17	Pemerintah Kota Makassar	2,45	Cukup
18	Pemerintah Kota Parepare	2,50	Cukup
19	Pemerintah Kota Palopo	2,90	Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	1,74	Cukup
2	Pemerintah Kab. Kolaka	3,15	Baik
3	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	2,01	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	1,87	Cukup
5	Pemerintah Kab. Buton Utara	2,02	Cukup
6	Pemerintah Kab. Buton Tengah	2,50	Cukup
7	Pemerintah Kota Kendari	2,02	Cukup
8	Pemerintah Kota Baubau	1,38	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Mamuju	1,90	Cukup
3	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	3,58	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Majene	2,55	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Buleleng	3,03	Baik
2	Pemerintah Kab. Jembrana	2,76	Baik
3	Pemerintah Kab. Karangasem	2,16	Cukup
4	Pemerintah Kab. Bangli	2,28	Cukup
5	Pemerintah Kab. Badung	2,48	Cukup
6	Pemerintah Kab. Tabanan	2,74	Baik
7	Pemerintah Kota Denpasar	3,68	Sangat Baik

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi NTB	3,24	Baik
2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	2,62	Baik
3	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	2,08	Cukup
4	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,23	Cukup
5	Pemerintah Kab. Dompu	1,20	Kurang
6	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	2,66	Baik
7	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,40	Cukup
8	Pemerintah Kota Mataram	3,16	Baik
9	Pemerintah Kota Bima	1,91	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi NTT	3,35	Baik
2	Pemerintah Kab. Kupang	1,85	Cukup
3	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	1,21	Kurang
4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,61	Baik
5	Pemerintah Kab. Alor	1,81	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sikka	1,83	Cukup
7	Pemerintah Kab. Flores Timur	1,52	Kurang
8	Pemerintah Kab. Manggarai	1,76	Kurang
9	Pemerintah Kab. Sumba Timur	2,31	Cukup
10	Pemerintah Kab. Sumba Barat	2,25	Cukup
11	Pemerintah Kab. Rote Ndao	2,48	Cukup
12	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,01	Baik
13	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	2,46	Cukup
14	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	1,35	Kurang
15	Pemerintah Kab. Nagekeo	1,14	Kurang
16	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	1,25	Kurang
17	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	2,14	Cukup
18	Pemerintah Kab. Malaka	1,99	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku	2,23	Cukup
2	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1,75	Kurang
3	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	1,84	Cukup
4	Pemerintah Kota Ambon	2,24	Cukup

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2,47	Cukup
2	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	2,33	Cukup
3	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	1,71	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,10	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,09	Cukup
3	Pemerintah Kab. Manokwari	1,60	Kurang
4	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1,53	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kaimana	1,16	Kurang
6	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	1,39	Kurang
7	Pemerintah Kota Sorong	1,72	Kurang

Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua	1,88	Cukup
2	Pemerintah Kab. Jayapura	2,61	Baik
3	Pemerintah Kab. Jayawijaya	1,51	Kurang
4	Pemerintah Kab. Keerom	1,39	Kurang
5	Pemerintah Kota Jayapura	1,85	Cukup

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2022

HASIL EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	3,43	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2,42	Cukup
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	1,54	Kurang
3	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	2,77	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Aceh Besar	1,85	Cukup
2	Pemerintah Kab. Pidie	2,03	Cukup
3	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,62	Kurang
4	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1,47	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1,13	Kurang
6	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	1,65	Kurang
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	1,62	Kurang
8	Pemerintah Kab. Gayo Lues	1,62	Kurang
9	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,01	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
10	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	1,54	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Simalungun	1,74	Kurang
2	Pemerintah Kab. Nias	2,02	Cukup
3	Pemerintah Kab. Nias Selatan	1,37	Kurang
4	Pemerintah Kab. Padang Lawas	1,72	Kurang
5	Pemerintah Kab. Nias Barat	1,79	Kurang
6	Pemerintah Kab. Nias Utara	1,48	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Bengkalis	2,21	Cukup
2	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2,13	Cukup
3	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	2,12	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Karimun	1,58	Kurang
2	Pemerintah Kab. Lingga	1,97	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	1,23	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,25	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Kaur	1,27	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	1,70	Kurang
2	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,09	Cukup
3	Pemerintah Kab. Lampung Timur	1,90	Cukup
4	Pemerintah Kab. Pesawaran	1,95	Cukup
5	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	1,94	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Melawi	1,27	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Kapuas	1,83	Cukup
2	Pemerintah Kab. Gunung Mas	1,99	Cukup
3	Pemerintah Kab. Murung Raya	1,77	Kurang
4	Pemerintah Kab. Seruyan	1,35	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	2,35	Cukup
2	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	1,76	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Berau	1,97	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Malinau	2,04	Cukup
2	Pemerintah Kab. Nunukan	2,35	Cukup
3	Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,06	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	1,64	Kurang
2	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	1,90	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,04	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Boalemo	2,02	Cukup
2	Pemerintah Kab. Pohuwato	2,06	Cukup
3	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	1,55	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Donggala	1,38	Kurang
2	Pemerintah Kab. Tolitoli	1,66	Kurang
3	Pemerintah Kab. Banggai	2,07	Cukup
4	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	1,51	Kurang
5	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	1,03	Kurang
6	Pemerintah Kab. Banggai Laut	1,22	Kurang
7	Pemerintah Kab. Morowali Utara	1,67	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Tana Toraja	1,62	Kurang
2	Pemerintah Kab. Takalar	1,96	Cukup
3	Pemerintah Kab. Luwu Timur	2,42	Cukup
4	Pemerintah Kab. Toraja Utara	1,77	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Konawe	1,70	Kurang
2	Pemerintah Kab. Buton	1,65	Kurang
3	Pemerintah Kab. Muna	1,38	Kurang
4	Pemerintah Kab. Bombana	2,08	Cukup
5	Pemerintah Kab. Wakatobi	1,27	Kurang
6	Pemerintah Kab. Konawe Utara	1,61	Kurang
7	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	1,33	Kurang

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
8	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	1,94	Cukup
9	Pemerintah Kab. Muna Barat	1,53	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Pasangkayu	1,09	Kurang
2	Pemerintah Kab. Mamasa	1,00	Kurang
3	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	1,83	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Lombok Timur	1,91	Cukup
2	Pemerintah Kab. Bima	1,36	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Belu	1,92	Cukup
2	Pemerintah Kab. Ngada	1,31	Kurang
3	Pemerintah Kab. Lembata	1,67	Kurang
4	Pemerintah Kota Kupang	2,05	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1,15	Kurang
2	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	1,92	Cukup
3	Pemerintah Kab. Buru	1,34	Kurang
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	2,02	Cukup
5	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	1,34	Kurang
6	Pemerintah Kab. Buru Selatan	1,14	Kurang
7	Pemerintah Kota Tual	2,05	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1,30	Kurang
2	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	1,72	Kurang
3	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	1,42	Kurang
4	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	1,55	Kurang

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kota Ternate	1,06	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Merauke	1,06	Kurang
2	Pemerintah Kab. Nabire	1,46	Kurang
3	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	1,61	Kurang
4	Pemerintah Kab. Mimika	1,83	Cukup
5	Pemerintah Kab. Boven Digoel	1,34	Kurang
6	Pemerintah Kab. Mappi	1,59	Kurang
7	Pemerintah Kab. Yahukimo	1,06	Kurang
8	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang	1,00	Kurang
9	Pemerintah Kab. Supiori	1,42	Kurang
10	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	1,42	Kurang
11	Pemerintah Kab. Lanny Jaya	1,06	Kurang
12	Pemerintah Kab. Intan Jaya	1,06	Kurang

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS